



B A P P E D A
PROVINSI SUMATERA BARAT



LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

APBD TAHUN 2024



Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang



0751 - 7054555, 7054374



bappeda.sumbarprov.go.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah ﷻ atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah selesai disusun.

Laporan tahunan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat yaitu membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Laporan ini juga menjadi salah satu media dalam mempertanggungjawabkan alokasi anggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Besar harapan Kami laporan ini dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2024, dan menjadi bahan dalam penyempurnaan rencana kinerja pada tahun yang akan datang.

Padang, 31 Januari 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



MEDI ISWANDI, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Gambaran Organisasi.....	2
1.4.1. Struktur Organisasi	2
1.4.2. Tugas Dan Fungsi Bappeda	3
1.4.2.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat.....	4
1.4.2.2 Tugas dan Fungsi Bidang P2EPD	4
1.4.2.3 Tugas dan Fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.....	5
1.4.2.4 Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	6
1.4.2.5 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.	7
1.4.2.6 Kelompok Jabatan Fungsional	8
1.4.3. Cascading Kinerja	10
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024	12
2.1. Tujuan dan Sasaran.....	12
2.1.1. Tujuan	12
2.1.2. Sasaran	12
2.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	13
2.3. Alokasi Anggaran	19
BAB III HASIL PELAKSANAAN	25
3.1. Realisasi Penyerapan Anggaran	25
3.2. Capaian Indikator Kinerja	45
BAB IV PENUTUP	47
4.1. Kesimpulan	47
4.2. Rekomendasi.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
Tabel 2.2 Program Kerja Tahun Anggaran 2024	13
Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD	14
Tabel 3.1.1 Kinerja Keuangan Tahun 2024.....	28
Tabel 3.1.2 Realisasi Serapan Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2024.....	30
Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda.....	3
Gambar 1.2. Cascading Bappeda Provinsi Sumatera Barat.....	10
Gambar 3.1.1 Grafik Persentase Jumlah Anggaran Bappeda per Program	26
Gambar 3.1.2 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan per Program	26
Gambar 3.1.3 Grafik Persentase Realisasi Keuangan TA 2024 per Bidang	27
Gambar 3.1.4 Grafik Perkembangan Realisasi Keuangan TA 2021 - 2024	28
Gambar 3.1.5 Perkembangan Realisasi Belanja TA 2024	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah dengan tugas pokok sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 mendapat alokasi anggaran APBD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Desember 2023 dengan DPA nomor : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 03 Januari 2024 sebesar Rp. 21.069.543.842,-. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2024 ditetapkan anggaran perubahan melalui Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan DPA nomor : DPA/A.3 /5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 dengan alokasi anggaran menjadi Rp. 20.054.954.042,-. Anggaran tersebut untuk mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hasil akhir yang menjadi tujuan dengan tersedianya anggaran tersebut adalah terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, maka disusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2024 ini berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang ada pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2024 ini adalah untuk mengevaluasi secara keseluruhan kinerja pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk :

1. Memberikan penilaian terhadap kinerja yang dilaksanakan masing-masing bidang sebagai evaluasi dari kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian sasaran program operasional tahunan yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang disediakan.
3. Bahan masukan dalam menyusun dan menyempurnakan program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun berikutnya.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2024 ini mempunyai batasan-batasan sebagai berikut :

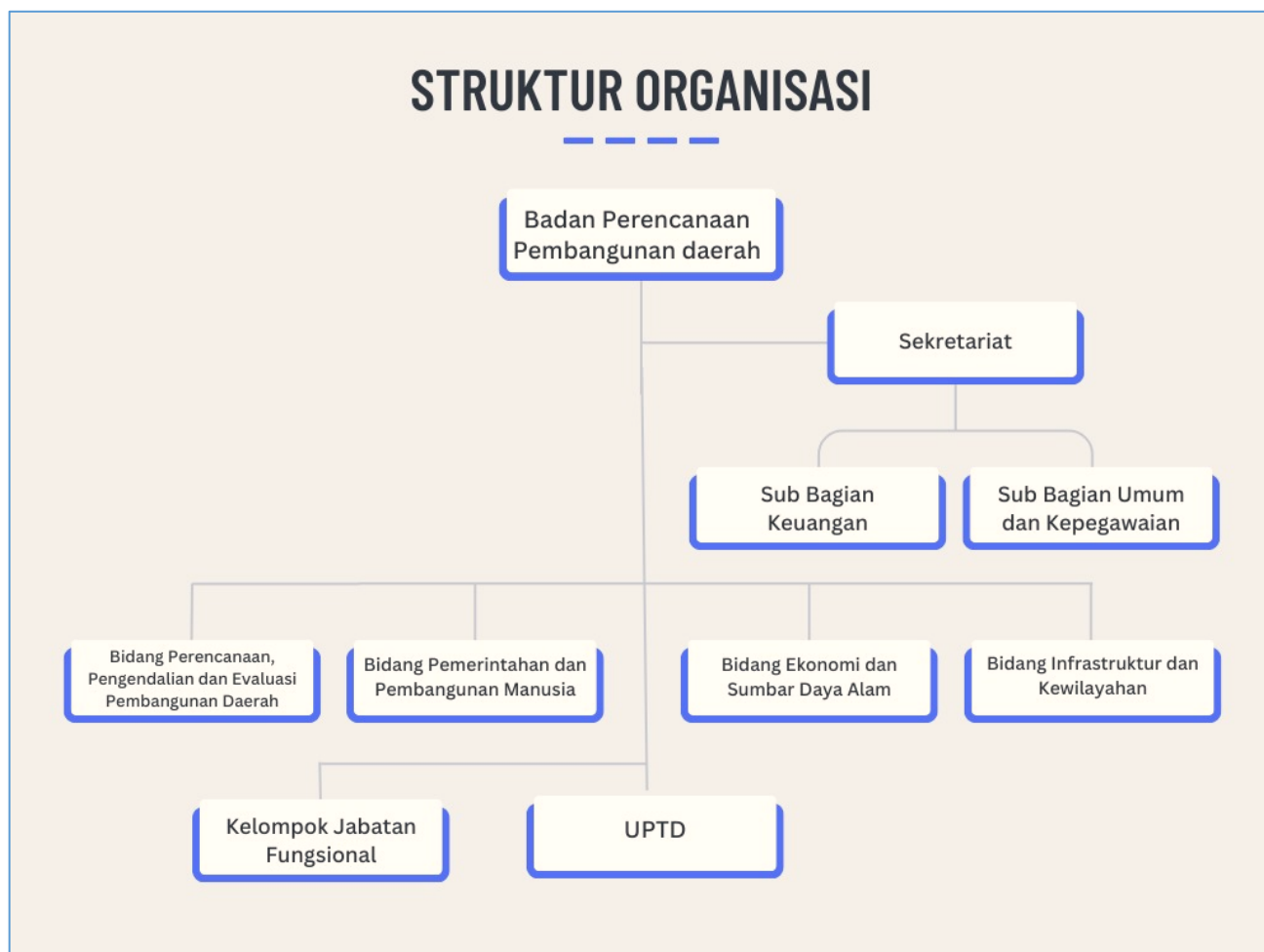
1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Program Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pemecahan masalah tersebut.
3. Rekomendasi tindak lanjut diperlukan sebagai acuan pokok dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun berikutnya.

1.4. Gambaran Organisasi

1.4.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Struktur susunan organisasi Bappeda adalah sebagai berikut :

- A. Kepala Badan
- B. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
- C. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- D. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- E. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- F. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- G. Kelompok Jabatan Fungsional
- H. UPTD

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda

1.4.2. Tugas Dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah.
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah.
- Pelaksanaan administrasi Badan.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Badan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Badan;
- d. Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Badan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan Dokumentasi internal Badan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Badan;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Badan;
- h. penyelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Badan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

1.4.2.2 Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- b. Penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- d. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

- e. Penyelenggaran Pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD.
- f. Penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah
- g. Penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan Daerah.
- h. Pengelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan Daerah.
- i. Penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- j. penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah.
- k. Penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah.
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2.3 Tugas dan Fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- c. Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD.
- d. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- g. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- h. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- i. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- k. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- l. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

1.4.2.4 Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, industri, perdagangan, investasi, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata dan koperasi serta usaha kecil dan menengah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- b. Penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (Perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif.
- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- d. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- f. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- h. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- k. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2.5 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dan Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- c. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- d. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- f. Penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW.
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- h. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

- i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- k. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Selain susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Sekretariat dan Bidang - Bidang, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir sebagai berikut :

- a. Perencana Ahli Pertama, meliputi :
 - 1. Mengidentifikasi permasalahan.
 - 2. Merumuskan permasalahan.
 - 3. Menginventarisasi dan identifikasi data sekunder.
 - 4. Inventarisasi dan identifikasi data primer.
 - 5. Mengolah data dan informasi.
 - 6. Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data.
 - 7. Menganalisis data dan informasi.
 - 8. Menyajikan data dan informasi.
 - 9. Melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana.
 - 10. Melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan.
 - 11. Mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.
- b. Perencana Ahli Muda, meliputi :
 - 1. Memformulasikan sajian untuk analisis.
 - 2. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan.

3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional.
5. Menguji alternatif kriteria dan model.
6. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek.
7. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral.
8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional.
9. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral.
10. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan.
11. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif.
12. Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

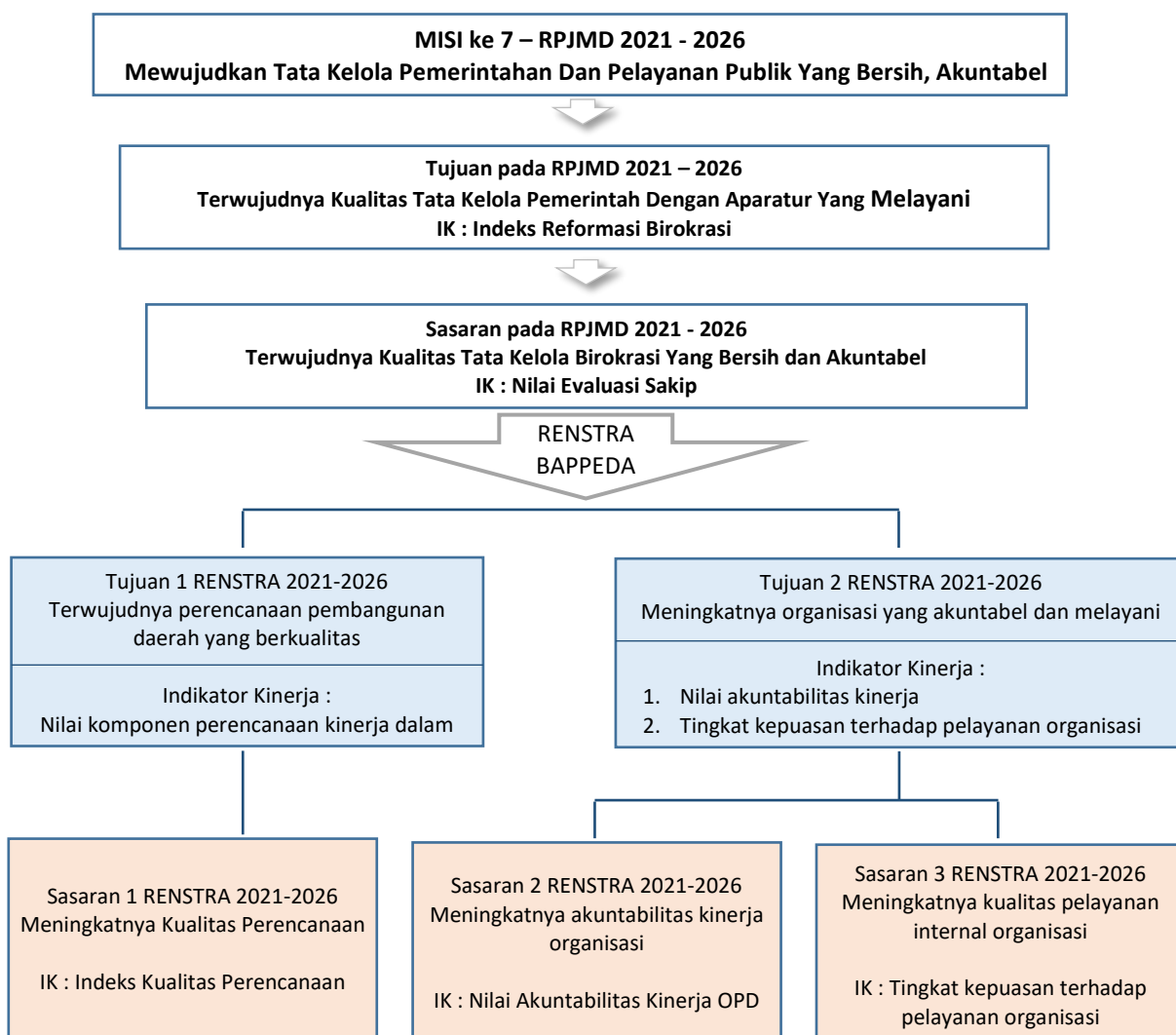
c. Perencana Ahli Madya, meliputi :

1. Menyusun rekomendasi kebijakan strategis.
2. Menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah.
3. Merumuskan kebijakan/program strategis sektoral.
4. Mendisain program lintas sektoral.
5. Menyusun rencana pelaksanaan, Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP).
6. Menyusun rencana pembangunan sektoral.
7. Menyusun rencana pembangunan lintas sektor.
8. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.
9. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program.
10. Menyusun disain instrumen dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah/sektoral.

1.4.3. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan skema kinerja yang digambarkan melalui cascading sebagai berikut :

Gambar 1.2. Cascading Bappeda Provinsi Sumatera Barat



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2024 yang memuat dasar hukum dibentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta tugas pokok dan fungsinya, Maksud dan Tujuan Laporan, Ruang lingkup penyusunan laporan disertai dengan batasan-batasan penulisan laporan agar lebih terarah, Gambaran Organisasi yang menggambarkan struktur organisasi beserta fungsinya yang juga dijabarkan dalam cascading kinerja, serta Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024

Bagian ini menguraikan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 yang telah tertuang dalam dokumen Renja 2024 yang meliputi Tujuan dan Sasaran serta Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB III Capaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2024

Bagian ini menguraikan capaian indikator kinerja, realisasi penyerapan anggaran, kendala dan permasalahan dan penghargaan yang diterima pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai target kinerja pembinaan yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun anggaran 2024.

BAB II

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

2.1. Tujuan dan Sasaran

2.1.1. Tujuan

Berdasarkan Misi ke 7 (tujuh) yang merupakan salah satu perwujudan dari visi Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas, dengan sasaran misi yang menjadi dasar tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan yang harus dicapai pada tahun 2024, yang tertuang dalam Renstra Bappeda 2021 – 2026, yaitu :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas
2. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

Melalui tujuan ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menghasilkan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas dalam arti bahwa dokumen perencanaan daerah tersebut harus konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.

2.1.2. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja
3. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Adapun sasaran strategis yang telah dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	81
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,83
3	Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	97,03

Tabel 2.2 Program Kerja Tahun Anggaran 2024

Program		Anggaran *	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.180.377.559	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.403.991.200	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.470.585.283	APBD

*Berdasarkan Perubahan APBD 2024

2.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat meliputi 3 program, 14 kegiatan dan 54 sub kegiatan. Kemudian pada Perubahan APBD 2024 dilakukan penyesuaian output dalam rangka efisiensi anggaran sehingga sub kegiatan menjadi 53 sub kegiatan. Sub kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut yaitu Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Adapun ruang lingkup kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Anggaran Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan
APBD Tahun 2024**

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan
III.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
8	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
IV.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	154 Paket
V.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	22 Paket
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	69 Paket
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
VI.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	5 Unit
VII.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
VIII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /rehabilitasi	1 Unit
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang diperlihara/direhabilitasi	28 Unit
IX.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3 Dokumen
24	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi publik	1 Berita Acara
25	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara
26	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen
X.	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 Dokumen
27	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen
28	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten /Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	38 orang
XI.	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	90 %
29	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan
30	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
31	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	38 Dokumen
XII.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 Dokumen
32	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	3 Dokumen
33	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan
34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan
36	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
37	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan
38	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
39	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
XIII.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 Dokumen
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan
42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan
44	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
45	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan
46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan
47	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan
XIV.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 Dokumen
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator
49	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan
50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan
52	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
53	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan
54	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan

2.3. Alokasi Anggaran

Berdasarkan DPA Nomor : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 03 Januari 2024 dan Perubahan DPA Nomor DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 10 Oktober 2024, fokus kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Pagu Perubahan APBD (Rp.)
5.1	PERENCANAAN	21.069.543.842	20.054.954.042
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.608.011.852	17.180.377.559
5.1.1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.731.600	47.241.500

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Pagu Perubahan APBD (Rp.)
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.864.100	29.239.100
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.446.000	8.121.000
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.421.500	9.881.400
5.1.1.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.923.310.035	11.745.521.727
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.640.495.535	11.481.779.227
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	238.575.000	222.924.000
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.239.500	40.818.500
5.1.1.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	127.905.500	114.454.990
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	110.000.000	105.574.490
5.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	11.300.000	2.275.000
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.605.500	6.605.500
5.1.1.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.000.000	115.500.000
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	132.000.000	115.500.000
5.1.1.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.968.369.593	3.031.272.597
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.892.500	33.892.500
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78.118.040	71.678.040
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.315.600	106.315.300
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.140.000	24.240.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Pagu Perubahan APBD (Rp.)
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.453.903.453	2.571.646.757
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	260.000.000	223.500.000
5.1.1.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	83.435.000
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	83.435.000
5.1.1.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.727.685.124	1.514.596.745
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.906.000	323.788.500
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.372.779.124	1.190.808.245
5.1.1.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.010.000	528.355.000
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.400.000	357.400.000
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.690.000	50.250.000
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.300.000	93.455.000
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.620.000	27.250.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.277.451.200	1.403.991.200
5.01.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	859.118.300	1.044.603.300
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	60.436.500	50.596.500

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Pagu Perubahan APBD (Rp.)
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	394.186.100	255.901.100
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	404.495.700	738.105.700
5.01.02.1.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	105.032.900	145.587.900
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	57.408.500	57.408.500
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	47.624.400	88.179.400
5.01.02.1.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	313.300.000	213.800.000
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	81.376.500	81.376.500
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	71.492.000	0
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	160.431.500	132.432.500
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.184.080.790	1.470.585.283
5.01.03.1.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	869.916.050	624.579.100
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	165.259.700	95.818.200
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	41.286.800	38.183.800

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Pagu Perubahan APBD (Rp.)
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	71.479.750	67.996.300
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	43.318.100	21.723.100
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	215.073.100	91.233.100
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	56.827.700	31.277.100
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	82.884.400	85.670.400
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	193.786.500	192.676.500
5.01.03.1.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	773.895.940	503.304.433
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.916.000	60.419.250
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	31.926.700	31.572.900
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	116.670.700	117.581.900
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	264.934.300	61.315.300

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Pagu Perubahan APBD (Rp.)
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	79.950.000	38.470.000
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	40.468.000	28.720.000
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	109.502.640	110.087.483
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	49.527.600	55.137.600
5.01.03.1.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	540.268.800	342.701.750
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	137.209.200	59.174.000
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.627.300	36.357.300
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	65.000.000	42.577.800
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	21.537.300	28.047.300
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	65.185.900	22.428.900
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	60.000.000	34.378.350
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	143.709.100	119.738.100

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

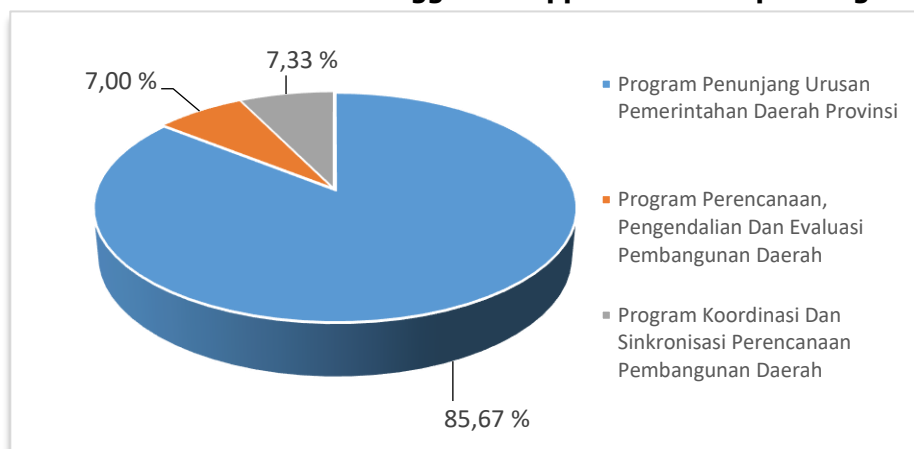
3.1. Realisasi Penyerapan Anggaran

Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Bappeda Provinsi Sumatera Barat hingga akhir Tahun Anggaran 2024 secara fisik telah mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.915.107.604,- atau sebesar 94,40% dari total Perubahan DPA Tahun Anggaran 2024. Anggaran tersebut tersebar dalam tiga program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; (2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan (3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kinerja masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut :

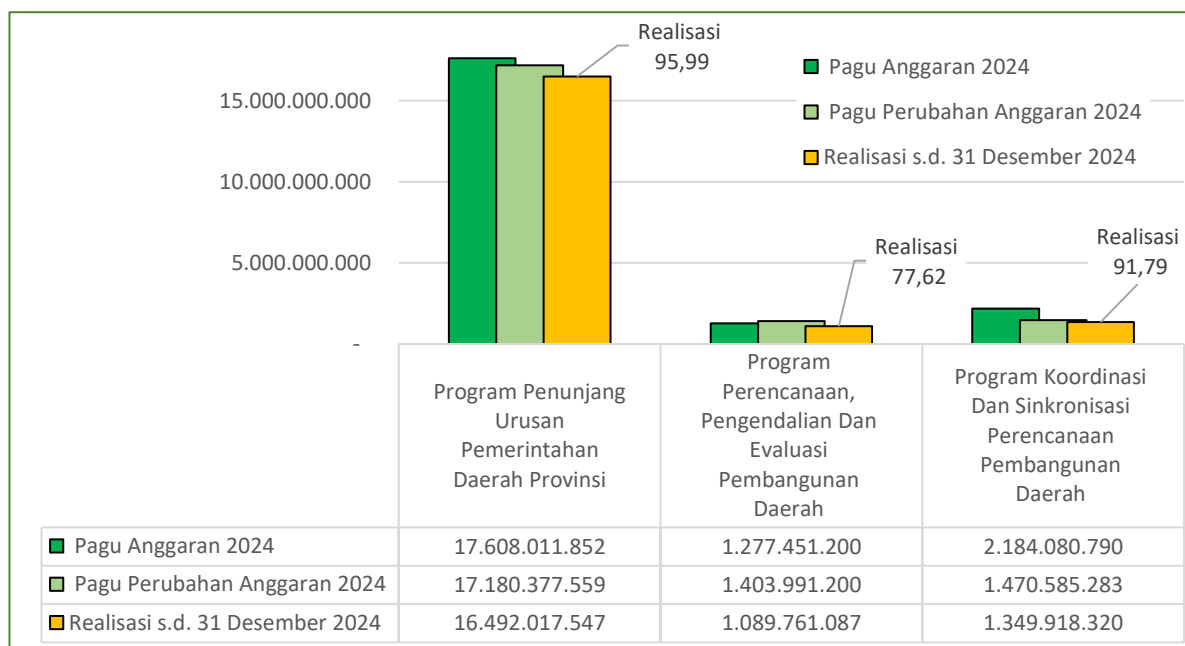
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan merupakan program dengan porsi anggaran paling besar yaitu Rp. 17.180.377.559,- (85,67 % dari total anggaran tahun 2024), memiliki realisasi keuangan 95,99% atau Rp. 16.492.017.547,-. Program ini terdiri dari 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan untuk mendukung capaian sasaran kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi. Indikator program ini adalah Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%.
- b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.403.991.200,- (7,00% dari total anggaran TA 2024), memiliki realisasi keuangan sebesar 77,62 % atau Rp. 1.089.761.087,-. Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan untuk mendukung sasaran kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan. Indikator program ini adalah Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Sesuai Dengan Target Dan Waktu Yang Ditetapkan Dalam Dokumen RPJMD Provinsi dengan target sebesar 90 % dan realisasi sampai akhir Desember 2024 sebesar 71,48 %. Belum tercapainya target indikator ini disebabkan beberapa data kinerja makro yang menjadi dasar perhitungan belum tersedia pada bulan Desember 2024 dan baru bisa didapatkan pada Februari 2025.
- c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara bersama oleh Bidang PPM, Bidang Ekonomi & SDA dan Bidang

Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan pagu anggaran pada perubahan APBD TA 2024 sebesar Rp. 1.470.585.283,- (7,33 % dari total anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2024), memiliki realisasi keuangan sebesar 91,79 % atau sebesar Rp. 1.349.918.320,-. Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 23 sub kegiatan untuk mendukung sasaran kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase Efektivitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD dengan target 90 % dan realisasi sebesar 100,00 %.

Gambar 3.1.1
Grafik Persentase Jumlah Anggaran Bappeda TA 2024 per Program



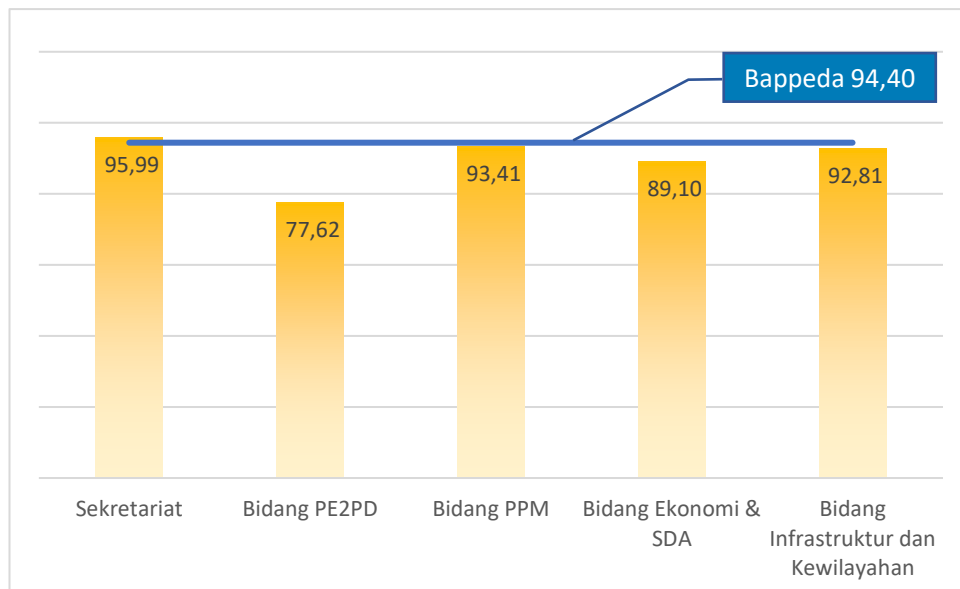
Gambar 3.1.2 Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan TA 2024 per Program



Jika dilihat dari perspektif bidang lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Barat, secara umum kinerja masing-masing bidang hingga akhir 2024 secara fisik 100% dengan capaian keuangan variatif. Serapan masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat, dengan anggaran pada Perubahan DPA Tahun 2024 sebesar Rp.17.180.377.559,-, sampai dengan akhir Desember 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 16.492.017.547,- atau sebesar 95,99 %.
2. Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD), dengan anggaran pada Perubahan DPA Tahun 2024 sebesar Rp. 1.403.991.200,-, sampai dengan akhir Desember 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.089.761.087,- atau sebesar 77,62 %. Rendahnya realisasi ini lebih disebabkan optimalisasi belanja dan efisiensi penggunaan anggaran terutama pada belanja perjalanan dinas.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan anggaran pada Perubahan DPA Tahun 2024 sebesar Rp. 624.579.100,-, sampai dengan akhir Desember 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 583.414.470,- atau sebesar 93,41 %.
4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) dengan anggaran pada Perubahan DPA Tahun 2024 sebesar Rp. 503.304.433,-, sampai dengan akhir Desember 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 448.445.050,- atau sebesar 89,10 %.
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan anggaran pada Perubahan DPA Tahun 2024 sebesar Rp. 342.701.750,-, sampai dengan akhir Desember 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 318.058.800,- atau sebesar 92,81 % dari alokasi anggaran.

**Gambar 3.1.3 Grafik Persentase Realisasi Keuangan
TA 2024 per Bidang**

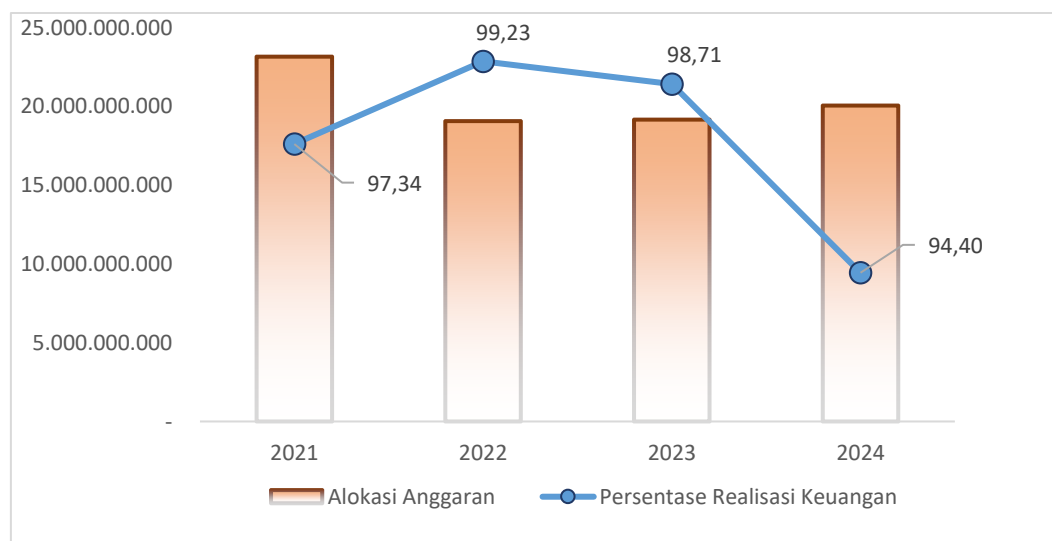


Tabel 3.1.1 Kinerja Keuangan Tahun 2024
Bappeda Provinsi Sumatera Barat per Bidang

No	Bidang	Anggaran APBD Tahun 2024	Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Realisasi terhadap Anggaran Perubahan
1	Sekretariat	17.608.011.852	17.180.377.559	16.492.017.547	95,99
2	Bidang PE2PD	1.277.451.200	1.403.991.200	1.089.761.087	77,62
3	Bidang PPM	869.916.050	624.579.100	583.414.470	93,41
4	Bidang Ekonomi dan SDA	773.895.940	503.304.433	448.445.050	89,10
5	Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	540.268.800	342.701.750	318.058.800	92,81
Total Anggaran		21.069.543.842	20.054.954.042	18.931.696.954	94,40

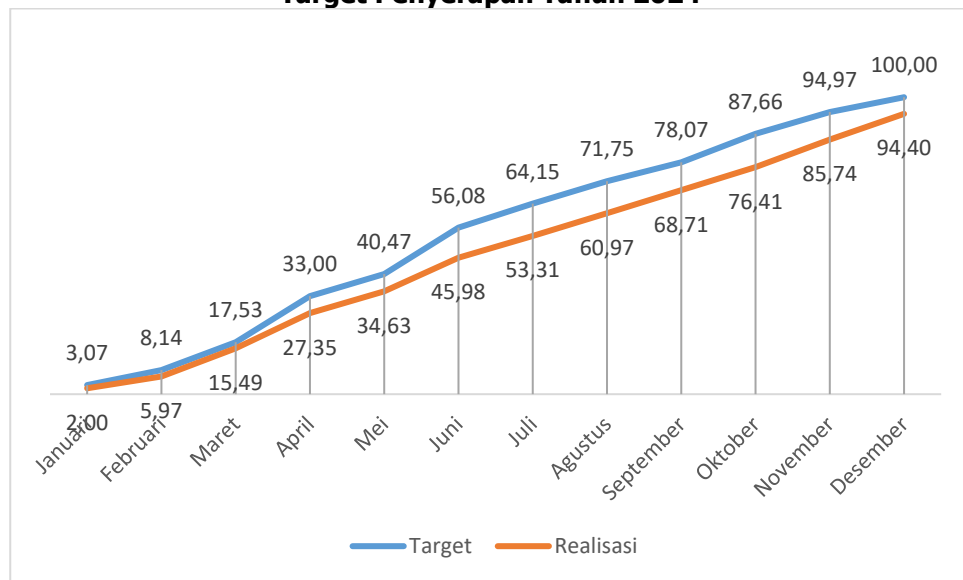
Perkembangan kinerja keuangan dalam empat tahun terakhir cenderung mengalami penurunan terutama sejak tahun 2022. Penurunan kinerja keuangan terbesar terjadi pada tahun 2024, dimana pada tahun 2023 capaian realisasi keuangan sebesar 98,71 % menurun menjadi 94,40 % pada tahun 2024. Kondisi ini disebabkan, pertama karena adanya arahan pimpinan untuk optimalisasi anggaran dalam rangka efisiensi belanja, terutama belanja perjalanan dinas. Kedua karena tidak terbayarnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Desember karena tidak tercapainya target PAD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

Gambar 3.1.4 Grafik Perkembangan Realisasi Keuangan
Tahun Anggaran 2021 - 2024
(Dalam Persen)



Perkembangan realisasi keuangan setiap bulannya pada tahun 2024 secara umum belum sesuai target yang telah disusun. terutama pada bulan Juni s.d. oktober dengan gap $\pm 10\%$ setiap bulannya dengan gap pada akhir desember 2024 menjadi 5,60 %. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan yang telah disusun tertunda pelaksanaannya sehingga tidak sesuai dengan rencana aksi anggaran yang dibuat. Selain itu, kebijakan optimalisasi pemanfaatan anggaran juga menjadikan realisasi setiap bulannya jauh dibawah target. Untuk memperbaiki keadaan ini dibutuhkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dilaksanakan sesuai waktu yang direncanakan.

Gambar 3.1.5 Perkembangan Realisasi Belanja dibandingkan Target Penyerapan Tahun 2024



Potret serapan anggaran berdasarkan masing-masing sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2 Realisasi Serapan Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01	PERENCANAAN			20.054.954.042		18.931.696.954		94,40
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	17.180.377.559	-	16.492.017.547	100 %	95,99
5.1.1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	47.241.500	-	46.223.050	100 %	97,84
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah	6 dokumen	29.239.100	6 Dokumen	29.137.850	100,00	99,78
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.121.000	4 Laporan	7.753.600	100,00	95,48
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	9.881.400	4 Laporan	9.295.600	100,00	94,07

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.1.1.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	11.745.521.727	-	11.235.139.422	100 %	95,65
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang /Bulan	11.481.779.227	74 orang /Bulan	10.971.596.922	100,00	95,56
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	222.924.000	12 Dokumen	222.724.000	100,00	99,91
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	40.818.500	13 Laporan	40.818.500	100,00	100
5.1.1.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	114.454.990		110.221.443	100 %	96,30
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	105.574.490	1 Dokumen	103.207.943	100,00	97,76
5.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	2 Laporan	2.275.000	2 Laporan	2.275.000	100,00	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
		Barang Milik Daerah Pada SKPD						
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Laporan	6.605.500	4 Laporan	4.738.500	100,00	71,74
5.1.1.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	115.500.000	-	114.730.000	100 %	99,33
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	154 Paket	115.500.000	154 Paket	114.730.000	100,00	99,33
5.1.1.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.031.272.597	-	2.904.582.701	100 %	95,82
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	22 paket	33.892.500	22 Paket	33.888.600	100,00	99,99
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	71.678.040	12 Paket	71.115.203	100,00	99,21
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	69 Paket	106.315.300	69 Paket	102.486.487	100,00	96,4

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	24.240.000	10 Paket	24.155.900	100,00	99,65
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.571.646.757	4 Laporan	2.453.936.511	100,00	95,42
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	223.500.000	1 Dokumen	219.000.000	100,00	97,99
5.1.1.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	83.435.000	-	74.955.000	100 %	89,84
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	5 Unit	83.435.000	5 Unit	74.955.000	100,00	89,84
5.1.1.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.514.596.745		1.498.099.505	100 %	98,91

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedikan	12 Laporan	323.788.500	12 Laporan	314.880.455	100,00	97,25
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.190.808.245	12 Laporan	1.183.219.050	100,00	99,36
5.1.1.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	528.355.000		508.066.426	100 %	96,16
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	357.400.000	10 Unit	346.384.247	100	96,92
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	50.250.000	52 Unit	42.730.000	100,00	85,03

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	93.445.000	1 Unit	91.879.229	100,00	98,31
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang diperlihara/direhabilitasi	28 Unit	27.250.000	28 Unit	27.072.950	100,00	99,35
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90%	1.403.991.200	-	1.089.761.087	71,48	77,62
5.01.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3 Dokumen	1.044.603.300	3 Dokumen	847.664.000	100 %	81,15
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi publik	1 Berita Acara	50.596.500	1 Berita Acara	50.581.250	100,00	99,97

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	255.901.100	1 Berita Acara	255.781.100	100,00	99,95
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD).	3 Dokumen	738.105.700	3 Dokumen	541.301.650	100,00	73,34
5.01.02.1.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	145.587.900	4 Dokumen	98.571.137	100 %	67,71
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	57.408.500	1 Dokumen	46.535.500	100,00	81,06
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten /Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	38 orang	88.179.400	38 Orang	52.035.637	100,00	59,01

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	90 %	213.800.000		143.525.950	100 %	67,13
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	81.376.500	2 Laporan	12.381.500	100,00	15,22
5.01.02.1.03.03	Monitoring , Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	38 Dokumen	132.423.500	38 Dokumen	131.144.450	100,00	99,03
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi	70 %	1.470.585.283	-	1.349.918.320	82,15	91,79

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 Dokumen	624.579.100	3 Dokumen	583.414.470	100 %	93,41
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	3 Dokumen	95.818.200	3 Dokumen	87.213.700	100,00	91,02
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	38.183.800	3 Laporan	37.362.300	100,00	97,85

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	67.996.300	1 Laporan	67.125.600	100,00	98,72
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	21.723.100	1 Laporan	21.693.100	100,00	99,86
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	91.233.100	3 Dokumen	81.974.100	100,00	89,85
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	31.277.700	3 Laporan	31.275.200	100,00	99,99

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	85.670.400	1 Laporan	77.399.970	100,00	90,35
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	192.676.500	1 Laporan	179.370.500	100,00	93,09
5.01.03.1.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 Dokumen	503.304.433	3 Dokumen	448.445.050	100 %	89,10
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	60.419.250	3 Dokumen	60.350.200	100,00	99,89

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	31.572.900	3 Laporan	31.567.200	100,00	99,98
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	117.581.900	1 Laporan	110.832.050	100,00	94,26
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	61.315.300	1 Laporan	37.263.000	100,00	60,77
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	38.470.000	3 Dokumen	38.426.000	100,00	99,89

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	28.720.000	3 Laporan	28.716.000	100,00	99,99
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	110.087.483	1 Laporan	103.846.000	100,00	94,26
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	55.137.600	1 Laporan	37.444.600	100,00	67,91
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 Dokumen	342.701.750	3 Dokumen	318.058.800	100 %	92,81

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	59.174.000	3 Dokumen	58.390.100	100,00	98,68
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	36.357.300	3 Laporan	36.103.800	100,00	99,3
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	42.577.800	1 Laporan	40.165.950	100,00	94,34
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	28.047.300	1 Laporan	26.477.000	100,00	94,4

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	22.428.900	3 Dokumen	22.421.900	100,00	99,97
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan	34.378.350	1 Laporan	33.735.450	100,00	98,13
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 laporan	119.738.100	1 Laporan	100.764.600	100,00	84,15

Dari 53 sub kegiatan terdapat beberapa sub kegiatan yang serapannya dibawah 80 % dengan capaian fisik tetap 100 %. Sub kegiatan tersebut yaitu :

1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD, dari anggaran Rp 6.605.500,- terealisasi Rp 4.738.500,- atau sebesar 71,74%. Penyebab rendahnya realisasi keuangan sub kegiatan ini karena kurang tepat dalam memperkirakan belanja pada saat perubahan anggaran sehingga terjadi sisa anggaran pada belanja penggandaan.
2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan anggaran Rp. 738.105.700,- terealisasi sebesar Rp. 541.301.650,- atau sebesar 73,34 %. Penyebab rendahnya realisasi keuangan sub kegiatan ini adalah optimalisasi penggunaan anggaran dalam rangka efisiensi pelaksanaan kegiatan.
3. Sub kegiatan Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota dengan anggaran Rp. 88.179.400,- terealisasi sebesar Rp. 52.035.637,- atau 59,01 %. Penyebab rendahnya realisasi keuangan sub kegiatan ini adalah optimalisasi penggunaan anggaran dalam rangka efisiensi pelaksanaan kegiatan.
4. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Provinsi dengan anggaran Rp. 81.376.500,- terealisasi sebesar Rp. 12.381.500,- atau sebesar 15,22%. Penyebab rendahnya realisasi keuangan sub kegiatan ini adalah optimalisasi penggunaan anggaran dalam rangka efisiensi pelaksanaan kegiatan terutama pada belanja perjalanan dinas.
5. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp. 61.315.300,- terealisasi sebesar Rp. 37.263.000,- atau sebesar 60,77 %. Penyebab rendahnya realisasi keuangan sub kegiatan ini adalah optimalisasi penggunaan anggaran dalam rangka efisiensi pelaksanaan kegiatan.
6. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan anggaran sebesar Rp. 55.137.600,- terealisasi sebesar Rp. 37.444.600,- atau sebesar 67,91 %. Penyebab rendahnya realisasi keuangan sub kegiatan ini adalah optimalisasi penggunaan anggaran dalam rangka efisiensi pelaksanaan kegiatan.

3.2. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat hingga akhir Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	81	94,59
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,83	84,09
3	Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	97,03	100.00

Hingga akhir Tahun 2024, kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diukur melalui 3 sasaran dengan masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan didasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini dilakukan berdasarkan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah dimana penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) menjadi salah satu komponen penilaian RB General K/L dan Pemerintah Provinsi sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian/Lembaga/Daerah (Pemerintah Provinsi). Tujuan dari penilaian IPPN ini adalah untuk memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun oleh seluruh instansi pemerintah berbasiskan dampak (outcome) untuk memastikan kebermanfaatan terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait. Capaian indikator ini adalah 94,59 yang berasal dari :
 - a. Aspek Sinergi dengan nilai 29,75
 - b. Aspek Kualitas Perencanaan dengan nilai 54,84
 - c. Aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja dengan nilai 10
2. Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/19/LHE/INSP/2024 tanggal 20 Juni 2024, mendapatkan nilai 84,09 (Predikat A)
3. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi yang dinilai melalui e-Survei kepuasan layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, hingga akhir Desember 2024 responden yang menyatakan puas dan sangat puas mencapai 100,00 % dari total 4.300 orang responden yang memberikan penilaian mulai tanggal 2 Januari s.d. 31 Desember 2024.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Bappeda Provinsi Sumatera Barat hingga akhir tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah Rp. 18.931.696.954,- atau sebesar 94.40 %. Meskipun kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat masih dibawah target, tetapi realisasi kinerja secara fisik telah mencapai 100%. Rendahnya realisasi keuangan masih dalam batas toleransi, mengingat terdapatnya penundaan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2024 karena tidak tercapainya target pendapatan daerah, serta adanya optimalisasi dalam rangka efisiensi beberapa sub kegiatan tanpa mengurangi output yang telah ditetapkan
2. Sasaran strategis yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan tiga indikator kinerja, hingga akhir tahun 2024 dapat tercapai, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang diukur berdasarkan Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) didapat nilai 94,59 (target 81).
 - b. Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/19/LHE/INSP/2024 tanggal 20 Juni 2024, mendapatkan nilai 84,09 - Predikat A (Target 81,83) .
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi yang dinilai melalui e-Survei kepuasan layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, hingga akhir Desember 2024 responden yang menyatakan puas dan sangat puas mencapai 100,00 % (target 97,03).

4.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan, antara lain:

1. Memperhatikan kembali kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas perencanaan.
2. Konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan serta anggaran kas yang telah disusun dalam DPA.

3. Dalam menyusun rencana kerja selalu memperhatikan aturan yang berlaku serta hasil revidi inspektorat dan BPK.
4. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap beberapa sub kegiatan yang memiliki realisasi dibawah 80%.

Demikian Laporan Tahunan Pelaksanaan APBD Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD TA 2024 atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang sekaligus sebagai referensi untuk kegiatan dimasa yang akan datang.